



Berharap Titik Temu PPMAY dan PKL Malioboro

● Pemkot Tanggapi Usulan Penataan Selasar Toko

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyebut, Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) tidak bisa serta merta meminta para Pedagang Kaki Lima (PKL) angkat kaki dari selasar toko. Pemkot berharap kedua belah pihak bisa menemukan titik temu persoalan ini.

Diberitakan sebelumnya, PPMAY meminta selasar, atau lorong kawasan pertokoan di Jalan Malioboro-Ahmad Yani ditata ulang. Khususnya, soal keberadaan PKL yang dianggap telah menyrobot lahan para pemilik toko.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, berujar, bagaimanapun juga PKL sudah memberikan warna tersendiri bagi kawasan Malioboro. "Hanya tinggal ditata saja, Malioboro tanpa PKL itu bagai sayur tanpa garam. Tapi, memang harus ditata, ditempatkan yang baik," terangnya, Selasa (13/4).

"Pokoknya, kedepankan hukum yang jelas untuk kedua belah pihak, nggak ada menang-menangan lah. Jangan di bulan puasa malah berkonflik," lanjut Haryadi.

Bukan tanpa alasan, orang nomor satu di kota pelajar itu menilai selasar

pertokoan di sepanjang Malioboro memiliki fungsi sosial yang besar. Sehingga, komunikasi jelas wajib dikedepankan dalam penyelesaian konflik.

Dari segi hukum, Haryadi pun mengaku tidak tahu menahu soal status kepemilikan selasar tersebut, meski PPMAY telah mengklaim memegang sertifikat sah yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Saya bukan ahli hukum, konfirmasi saya ke BPN, kalau saya bicara kepunyaan ini, atau kepunyaan itu, wong PKL yang dagang juga mau beli," cetus Wali Kota.

Benar saja, imbuhnya, PKL yang kini menempati lorong di sepanjang Malioboro tidak sekonyong-konyong menaruh lapaknya di sana. Pasalnya, mereka sudah melakukan transaksi jual-beli dengan pendahulunya.

"PKL dagang di sana kan dulunya juga beli, ada transaksi. Yang sekarang ini kan beli, dulu-dulunya bagaimana? Dulu dipakai kan diam, terus sekarang begini jadi ramai, ya," pungkas Haryadi.

Koordinator PPMAY, KRT Karyanto Purbokusodo, mengatakan, pihaknya

telah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sejak November 2020 yang lalu. Dirinya mengaku telah menemui pemangku kebijakan Pemkot Yogyakarta, selain itu ia juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Mereka (pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta) mengakui bahwa lorong atau selasar yang ada di sepanjang Jalan Malioboro-Ahmad Yani bukan milik pemerintah, melainkan milik toko," katanya, kepada *Tribun Jogja*.

Pengawas dan Penasihat Koperasi Paguyuban Tri Dharma KPL Malioboro, Rudiarto mengatakan, dirinya dan 913 pedagang lainnya yang tergabung di Koperasi Tri Dharma menolak keras apabila pihaknya diklaim telah memanfaatkan lahan para pemilik toko.

Menurut sejarah yang ia ketahui, pembangunan lorong di kawasan Malioboro dilakukan Pemkot Yogyakarta bukan dari lahan pemilik toko. "Tapi saat itu toko diminta mundur tiga meter untuk kepentingan publik. Saya kira tidak pantas kalau berpikir untuk hak privat," katanya. (aka/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005